

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SELASA
7 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



GARA-GARA CEMBURU, PRIA INI ANIAYA KEKASIHNYA HINGGA MEMBAKAR MOTOR



PEMROV KALTIM DIMINTA
PERHATIKAN KETERBUKAAN
LAPANGAN KERJA



GARA-GARA CEBURU, PRIA INI ANIAYA KEKASIHNYA HINGGA MEMBAKAR MOTOR

SAMARINDA - Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang berhasil mengamankan seorang pria berinisial EW karena telah melakukan pembakaran, pengrusakan barang dan pengancaman disertai penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial DW, Jumat (3/11/2023)

Kapolsek Sungai Pinang, Kompol Ahmad Abdullah mengungkapkan, korban DW awalnya pada hari Minggu (24/9/2023) tengah malam, memergoki tersangka EW sedang melakukan upaya pembakaran terhadap sepeda motor Honda Vario miliknya dengan cara menggunakan korek api, 3 kain yang berada di jemuran serta merobek kulit jok motornya.

"Korban DW langsung mencoba memadamkan api tersebut kemudian sempat adu mulut dengan pelaku dan pelaku mengaku sakit hati atau cemburu terhadap korban," ungkap Kapolsek.

Tak cukup sampai di situ, lanjut Kapolsek, EW yang ma-

sih sakit hati kembali mencoba menyerang korban DW pada hari Rabu (1/11/2023) tengah malam. EW dengan sengaja menunggu korban pulang dari tempat kerjanya dan saat korban melintas dengan motor Honda Varionya di Jalan A.W. Syahrani langsung ditabrak oleh Pelaku EW menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun.

"Pelaku EW kemudian melakukan pengrusakan terhadap motor dan membuang kuncinya kemudian pelaku membanting telepon genggam milik korban hingga rusak. Masih belum puas dengan hal tersebut akhirnya pelaku menganiaya korban menggunakan helm dan sempat mengancam akan membunuh korban dengan penjepit kuku," beber Kapolsek.

Setelah mengalami serangkaian peristiwa tersebut korban melapor ke Polsek Sungai Pinang. Personel Polsek Sungai Pinang membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk melakukan pencarian.

Pada hari Jumat (3/11/2023) berhasil mengamankan tersangka EW di tempat persembunyiannya di daerah Loa Janan, Kabupaten Kukar.

Tersangka EW dijerat dengan 4 pasal yaitu 187 KUHP tentang pembakaran, pasal 335 KUHP tentang pengancaman, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan yang mana diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

"Motif tersangka EW ini melakukan semua perbuatannya terhadap korban ini karena rasa sakit hati atau cemburu, oleh karena itu kita himbau kepada seluruh masyarakat agar dalam menyikapi semua permasalahan dengan kepala dingin dan tidak menggunakan tindak kekerasan, yang tentunya akan merugikan orang lain dan pelaku, Tutup Kompol Ahmad Abdullah, S.H., M.H., Kapolsek Sungai Pinang. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin (Humas DPRD Kaltim)

PEMROV KALTIM DIMINTA PERHATIKAN KETERBUKAAN LAPANGAN KERJA

SAMARINDA - Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Namun, hal ini belum diimbangi dengan keterbukaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi ribuan lulusan perguruan tinggi dan pengangguran setiap tahunnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin mengatakan, Pemrov Kaltim harus mencari solusi untuk menciptakan peluang usaha yang lebih luas dan beragam.

"Setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi ditambah pengangguran yang memerlukan ruang dalam dunia kerja. Ini harus diberikan solusi," tegasnya, Senin (6/11/2023).

Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi dampak ekonomi global, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor. Politisi Gerindra ini menilai bahwa Pemprov

harus jeli melihat potensi-potensi usaha lain yang bisa dimanfaatkan.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kaltim yang meningkat. Apalagi, saat ini banyak tenant di pusat perbelanjaan yang tutup karena kalah bersaing dengan transaksi online," ujarnya.

Baharuddin berharap, Pemprov Kaltim sudah memperhitungkan keadaan ekonomi makro saat ini dalam merencanakan proyeksi pendapatan pada 2024.

Ia juga meminta Pemprov Kaltim lebih aktif dalam membaca peluang usaha perekonomian yang bisa menambah pemasukan daerah sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

"Kita harus memaksimalkan keterbukaan lapangan kerja agar masyarakat Kaltim bisa sejahtera dan mandiri," tutupnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL



TOBER

Deluxe Room ONLY
Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp488rb
NETT/NIGHT

benefits

- Breakfast** 2 pax
- FREE Laundry** Up To 2 pcs
- FREE Kopi Inspirasi** Buy 3, Pay 2
- FREE Afternoon Tea**
- FREE Mini Mantou** 5 pcs

→ BOOK NOW

0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com



MAKMUR MARBUN TUNTUT KEDISIPLINAN ASN PEMKAB PPU



PEMKAB PPU AUDIENSI PROGRAM
KOMUNITAS ISI PIRINGKU TANGANI
PERMASALAHAN STUNTING



Pj Bupati PPU saat memberikan penghargaan pada salah satu ASN yang telah purnabakti pada apel rutin, Senin (6/11/2023). (Subur Priono, Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

MAKMUR MARBUN TUNTUT KEDISIPLINAN ASN PEMKAB PPU

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu pilihan. Hal ini ia sampaikan di hadapan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kerjanya saat memimpin apel rutin, Senin (6/11/2023).

Dalam gelaran kali ini, Makmur memberikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu PNS yang purnabakti atau masuk masa pensiunnya. Yaitu Suyatno, salah satu pejabat di Bagian Pemerintahan Setkab PPU yang telah mengabdikan diri selama 33 tahun 8 bulan sebagai ASN.

Dalam penyampaian, Makmur menegaskan pada seluruh aparaturnya agar dapat menanamkan nilai kedisiplinan. Oleh karena pilihannya menjadi ASN, maka sudah merupakan tanggung jawab dan siap dengan konsekuensi yang dihadapi.

"Mohon maaf kalau Saya mengganggu waktu Bapak/Ibu sekalian, karena inilah salah satu konsekuensi menjadi ASN. Kita harus

siap di kritik bahkan harus siap di maki-maki dan sebagainya," katanya.

Di samping itu, ASN juga wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ini utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan, sebagai komitmen dalam pelayanan masyarakat yang baik.

"Bagaimana Kita mau menjadi ASN yang baik, kalau disiplin saja tidak bisa. Karena disiplin adalah yang utama, kalau disiplin saja tidak bisa, lebih baik mengundurkan dari ASN. Karena masih banyak yang antre ingin jadi ASN," tegas Makmur.

Ketegasan Makmur ini juga ditunjukkan dalam apel pagi yang digelar tiap Senin ini. Ia mempertanyakan sejumlah pegawai yang tidak ikut apel pagi tanpa keterangan.

"Jangan sampai yang rajin justru selalu mendapat omelan ketika apel. Jadi saya minta semua yang tanpa keterangan, tidak ikut apel pagi ini, tolong dicatat dan sampaikan ke Saya," tutupnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam menyampaikan press release hasil Pilkades Serentak 2023, Senin (6/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU SUKSES GELAR PILKADES SERENTAK 2023, 14 KADES BARU SEGERA DILANTIK

PPU - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 14 desa di Penajam Paser Utara (PPU) telah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam suksesi itu, Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan press rilis hasil pelaksanaan mulai tahap seleksi hingga pemungutan suara dan pengumuman.

Makmur menyatakan rasa syukur atas lancarnya penyelenggaraan pesta demokrasi pada pemerintahan terbawah di Benuo Taka ini. Terlebih baginya, yang baru menjabat sebagai pimpinan Pemkab PPU September lalu.

"Alhamdulillah Pilkades serentak Tahun 2023 di Kabupaten PPU telah berjalan dengan baik dan lancar," katanya, Senin, (06/11/2023).

Seperti diketahui, penyelenggaraan pilkades serentak empat kecamatan di Kabupaten PPU dilaksanakan pada 29 Oktober 2023. Kemudian dijadwalkan Pelantikan kepala desa terpilih ini akan dilaksanakan pada 11 Januari 2024 seiring dengan habisnya masa jabatan kades di 14 desa yang mengikuti pilkades seren-

tak 2023 ini.

Dari pilkades ini, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dari 14 Desa yang tersebar di 4 kecamatan sebanyak 30.155 jiwa. Terdiri dari pemilih laki-laki 15.448 dan pemilih perempuan 14.634 jiwa dengan 60 TPS yang tersebar.

Makmur menyebut bahwa semua proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Termasuk tahapan baru, yakni dengan telah dilakukannya seleksi langsung kepada sejumlah desa bagi peserta pilkades yang lebih dari 5 calon.

Hal itu sesuai dengan pasal 26 Perbup Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dalam prosesnya, seleksi melibatkan langsung tim independen dari Universitas Indonesia (UI).

"Ini yang pertama di PPU melibatkan langsung tim independen dari UI. Kami ingin seleksi calon kepala desa di PPU ini berjalan dengan baik," terang Makmur

Juga dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU turun me-

monitor langsung pelaksanaan. Ini sebagai bentuk kepastian atas penyelenggaraan Pilkades yang tak hanya baik, namun juga jujur dan adil.

"Saya telah menugaskan langsung kepala dinas terkait untuk melakukan pendampingan dan dapat bertanggung jawab melaksanakan monitoring pelaksanaan pilkades di PPU. Saya juga turun langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pilkades di PPU berjalan dengan baik," ungkapnya.

Turut disampaikan pula dalam kegiatan ini, dari 14 desa yang menggelar pilkades, terdapat 11 calon kepala desa (cakades) yang turut berpartisipasi. Sementara 3 cakades lainnya, gagal dalam tes seleksi tertulis.

Pun 11 cakades itu, seluruhnya dinyatakan tidak terpilih kembali. "Pertanyaannya apa yang sebetulnya terjadi? Sementara mereka telah diberi ruang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi kok tidak berhasil. Ini perlu dipahami sebabnya," pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati Makmur Marbun dan jajaran bersama dengan perwakilan dari Komunitas Isi Piringku bersama Aisyiyah, Senin (6/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU AUDIENSI PROGRAM KOMUNITAS ISI PIRINGKU TANGANI PERMASALAHAN STUNTING

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menerima audiensi terkait rencana Program Komunitas Isi Piringku bersama Aisyiyah, Senin (6/11/2023). Acara audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati PPU, yang difasilitasi oleh perusahaan multinasional Danone.

Program Komunitas Isi Piringku bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya edukasi kesehatan, gizi. Serta pola asuh yang baik selama periode tumbuh kembang anak sebagai upaya inovatif, promotif, preventif menuju Generasi Emas 2045.

Dalam kegiatan ini, turut serta membahas permasalahan stunting dan strategi yang dapat diimplementasikan guna menangani permasalahan tersebut yang telah menghantui PPU. Menurut Makmur, isu ini menjadi persoalan yang krusial di PPU yang perlu segera dituntaskan.

"Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Penajam Paser Utara adalah prioritas utama bagi kami. Kami sangat mendukung upaya dari Komunitas Isi Piringku bersama Aisyiyah dan inisiatif perusahaan multinasional Danone dalam meningkatkan pemahaman gizi dan kesehatan masyarakat Kami," terangnya.

Adapun program ini merupakan komit-

men Danone dalam memandang keterkaitan yang erat antara kesehatan manusia dan bumi. Serta mendasarkan motivasinya untuk berkontribusi pada bidang gizi, kesehatan, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, audiensi ini menjadi panggung bagi diskusi terkait upaya peningkatan status gizi di Indonesia. Khususnya terkait kekurangan asupan nutrisi pada berbagai kelompok usia, termasuk protein, sayuran, dan buah-buahan.

Makmur berharap audiensi ini dapat melahirkan solusi konkret untuk menangani masalah stunting. Membuka secara mendalam tentang langkah-langkah strategis dan program-program inovatif menjadi fokus pembahasan.

Mulai dari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait guna mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan yang terjadi di wilayah ini. Sebab, kesinambungan dan kolaboratif menjadi landasan bagi implementasi solusi yang terencana untuk menangani permasalahan.

"Semoga audiensi ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas di Penajam Paser Utara," tutup Makmur. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat pembukaan sosialisasi dan bimbingan teknis kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 2020, Senin, (6/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

BUKA SOSIALISASI DAN BIMTEK KURIKULUM TK/ TPA PPU, MAKMUR: GURU BERPERAN STRATEGIS DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK BANGSA

PPU - Seluruh elemen masyarakat di Penajam Paser Utara (PPU) memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Termasuk pula dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan untuk menyongsong generasi emas 2045.

Hal itu disampaikan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat secara resmi membuka sosialisasi dan bimbingan teknis kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 2020, Senin, (6/11/2023). Dalam acara ini diikuti oleh sekira 311 guru TK/TPA dan berlangsung di Aula Masjid Agung Al-Ikhlas PPU.

"Kita harus memahami bahwa pendidikan Al-Qur'an di tingkat TK dan TPA bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan saja. Tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen masyarakat," katanya.

Termasuk juga peran strategis guru dalam membentuk karakter anak-anak. Hal ini merupakan langkah kunci untuk menyongsong generasi emas 2045.

"Mari tingkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, keluarga, dan komunitas dalam mencetak generasi yang mencintai Al-Qur'an," sambung Makmur.

Marbun menjelaskan bahwa guru dan pendidik TK/TPA memiliki peran krusial dalam

membentuk sikap dan pola pikir anak-anak. Oleh karena itu, pentingnya memberikan dukungan maksimal kepada mereka dalam mengembangkan kreativitas, metode pembelajaran yang inovatif, dan peningkatan kualitas pribadi sebagai teladan yang baik.

"Bimtek dan sosialisasi kurikulum TK/TPA ini diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendengarkan pengalaman para praktisi, mendapatkan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan Al-Qur'an, dan merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas TK dan TPA di daerah tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Makmur mengapresiasi semangat keagamaan yang menjadi ciri khas Badan Kontak Majelis Taklim (BKPRMI) PPU. Dalam hal ini mampu meyakinkan bahwa pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terlibat akan mampu mencetak generasi cerdas secara akademis.

"Serta menjadikan mereka individu yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Semoga terus bersinergi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan dalam TK/TPA terus berlanjut di Kabupaten Penajam Paser Utara," pungkasnya, (ADV/SBK)



DUKUNG KUKAR JADI LUMBUNG PANGAN, DESA LOH SUMBER GENCAR BANGUN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN



**Kelurahan Bukit Biru Bantu Proses
Distribusi Bantuan Pangan Untuk 162 KPM**



Ilustrasi. Suasana pembangunan jaringan irigasi pertanian. (Istimewa)

DUKUNG KUKAR JADI LUMBUNG PANGAN, DESA LOH SUMBER GENCAR BANGUN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN

TENGGARONG- Dalam rangka menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejumlah Desa di Kukar terus berfokus untuk mengembangkan sektor pertanian. Salah satunya adalah Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu.

Saat ini, Desa Loh Sumber sedang gencar membangun infrastruktur pertanian. Berupa jaringan irigasi untuk pertanian padi sawah. Pembangunan sejumlah saluran irigasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Kukar.

Diketahui bahwa pembangunan irigasi di Desa Loh Sumber telah dimulai pada awal 2023. Panjang jaringan irigasi ini mencapai enam kilometer dan melintasi empat rukun tetangga (RT) yang berbeda. Pekerjaan ini ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian di desa tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memastikan bahwa program pertanian berbasis kawasan yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten berjalan sesuai rencana. Selain itu, infrastruktur ini juga akan memastikan pengairan pertanian padi sawah di desa berjalan dengan optimal.

"Progres pembangunan irigasi ini terletak di empat titik berbeda. Saat ini kurang lebih

80 persen jaringan irigasi di desa sudah tersambung dengan baik," ucap Sukirno.

Ia juga menyatakan bahwa pembangunan irigasi telah lama diharapkan oleh petani di desa tersebut. Selama bertahun-tahun, petani di Desa Loh Sumber masih menggunakan sistem pengairan tadah hujan, yang dianggap kuno terutama ketika musim kemarau tiba. Oleh karena itu, infrastruktur irigasi dibangun untuk mengalirkan air sungai melalui irigasi hingga mengairi persawahan warga.

"Sekarang kami sudah memastikan bahwa seluruh jaringan irigasi tersambung dengan aliran air yang normal," ucapnya.

Sukirno juga menjelaskan bahwa untuk mendukung pembangunan irigasi ini, pihak desa mengajukan proposal kepada Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kukar pada tahun lalu. Dan hasilnya, Dinas PU telah membangun jaringan irigasi sepanjang enam kilometer pada tahun ini.

Sebagai penerima manfaat dari pembangunan irigasi, ada sembilan kelompok petani padi sawah di Desa Loh Sumber. Rincian pembangunan irigasi ini melintasi empat RT yang berbeda, yaitu RT 5, 6, 8, dan 9.

"Dengan tersambungannya seluruh jaringan irigasi ini, kita akan mengatasi masalah pengairan yang ada. Yang paling penting, petani tidak akan lagi kesulitan dalam mengairi padi sawah mereka," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Bukit Biru, yang dilakukan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

Kelurahan Bukit Biru Bantu Proses Distribusi Bantuan Pangan Untuk 162 KPM

TENGGARONG- Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, turut mengawal proses distribusi bantuan cadangan pangan yang disalurkan pemerintah pusat. Untuk 162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bukit Biru.

Bantuan cadangan pangan berupa beras yang didistribusikan oleh Kelurahan Bukit Biru ini, merupakan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Bantuan ini menyasar keluarga yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata dan juga kategori lanjut usia (lansia).

"Untuk di Kelurahan Bukit Biru, ada sekitar 162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Kasi Sosial Kelurahan Bukit Biru, Awaluddin Afif, Senin (6/11/2023).

Dijelaskannya bahwa, KPM yang menerima bantuan tersebut merupakan mereka

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dari program lain.

Adapun untuk penyaluran bantuan pangan ini diberikan setiap bulan dengan jumlah 10 kg untuk setiap KPM. Namun untuk penyalurannya biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

"KPM biasanya mendapatkan setiap tiga bulan sekali, untuk periode bulan Oktober ini sudah kita salurkan. Para KPM mendapatkan bantuan pangan beras tersebut dari bulan Januari hingga Desember," tambahnya.

"Harapannya program bantuan ini bisa terus berjalan karena memang masih banyak yang membutuhkannya," tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana pawai pembukaan kegiatan Kampong Kuliner Tradisional ke-4 di Kelurahan Baru. (Istimewa)

Kelurahan Baru kembali Gelar Kampong Kuliner Tradisional

TENGGARONG- Komunitas G7 Muda dan Kreatif Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, menggelar Festival Kampong Kuliner Tradisional ke-4. Gelaran festival sendiri, berlangsung di RT 6 Kelurahan Baru.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar di Kelurahan Baru. Dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat dan memperkenalkan kembali kesenian dan budaya tradisional Kutai, khususnya di sektor kuliner.

Kegiatan ini dimulai dengan pawai bersama yang dilepas oleh Lurah Baru, Bayu Ramanda Baninugraha. Kemudian dilanjutkan dengan acara Beseprah atau makan bersama masyarakat Kelurahan Baru. Kegiatan ini dipastikan akan berlangsung selama sepekan. Yakni dari tanggal 5-11 November 2023.

Bayu mengatakan, kegiatan ini diinisiasi oleh warga RT 6, khususnya di Gang 7 Kelurahan Baru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengangkat kebudayaan Kutai yang kerap timbul dan tenggelam. Sehingga masyarakat Kelurahan Baru melakukan upaya untuk menghidupkan kembali kearifan lokal yang ada, agar terus diketahui oleh khalayak banyak.

Mengingat selama ini, adat budaya Kutai yang dipahami masyarakat hanya yang terlihat di lingkup kesultanan. Padahal ada

hal-hal yang menarik dan tumbuh di masyarakat. "Kegiatan tahun ini yang ke-4 dan Alhamdulillah tahun ini dapat bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Dan antusias masyarakat dengan adanya kegiatan ini cukup meriah," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan ini, dapat berdampak secara luas. Mengingat Kelurahan Baru adalah kelurahan yang terkecil di Tenggara. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan perputaran ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Kampong Kuliner Tradisional ke-4, Ihza, menyatakan bahwa kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan. Termasuk pawai, beseprah, lomba olahraga tradisional, lomba mewarnai, lomba karaoke, serta hiburan seperti tingkulan dan tarian.

Selain itu, terdapat 17 tenant Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menawarkan makanan khas Kutai. Seperti bingka, sanggar, berbagai macam kue serabi, dan lainnya. "Kegiatan ini diharapkan dapat meriah dan memberikan manfaat bagi para UMKM dan ekonomi masyarakat setempat," tutup Ihza. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Ilustrasi pelaksanaan program RTLH. (Istimewa)

Kelurahan Bukit Biru Turut Kawal Realisasi Program RTLH

TENGGARONG- Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, turut serta dalam mengawal pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Kelurahan Bukit Biru, pun turut memastikan dan membantu pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH di Bukit Biru yang berjumlah 74 unit bangunan rumah. Perbaikan ini dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama menasar 12 rumah yang tersebar di enam RT.

“Kalau untuk tahap kedua, ada sebanyak 62 rumah yang tersebar di 21 RT. Ini yang juga terus kita bantu,” kata Kasi Sosial Kelurahan Bukit Biru, Awaluddin Afif, Senin (6/11/2023).

Ia menjelaskan, tahap kedua program RTLH masih dalam tahap pemberkasan. Namun akan direalisasikan pada tahun 2023 ini, dimana setiap rumah yang diperbaiki dengan anggaran senilai Rp 50 juta.

“Perbaikannya seperti dinding, sekat kamar, lantai dan atap rumah. Pengerjaannya dilakukan oleh Bhabinsa dari Kodim 0906/Kukar bersama warga,” tuturnya.

Untuk diketahui, program ini dikerjakan

oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar yang bekerjasama dengan pihak Kodim 0906/Kukar. Kelurahan sendiri mengambil peran untuk mendata warga yang membutuhkan bantuan perbaikan.

“Jadi ada verifikasi, mulai dari dokumen kepemilikan, tingkat kerusakan dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” imbuhnya.

“Kalau untuk pengerjaannya, biasanya dibutuhkan satu sampai dua minggu untuk satu rumah, tergantung dari kondisi cuaca dan materialnya. Targetnya semua rumah yang ada di tahap dua ini bisa terealisasi tahun ini juga,” jelasnya.

Tentunya perbaikan rumah ini disambut antusias oleh masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan oleh Afif bahwa masyarakat merasa senang dan bahagia lewat program pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini.

“Masyarakat sangat menyambut baik dan senang akan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



WISATAWAN SAMARINDA MENINGGAL TENGGELEM DI BERAS BASAH

BACA HALAMAN A2



POGBA BONTANG JUARA I FJL, WAKILI KALTIM DI TINGKAT NASIONAL



Seorang pria asal Samarinda dinyatakan meninggal dunia usai tenggelam di Pulau Beras Basah. (Dwi).

Wisatawan Samarinda Meninggal Tenggelam di Beras Basah

BONTANG - Seorang pria berinisial CIA (27) yang berasal dari Samarinda dinyatakan meninggal dunia di Pulau Beras Basah pada pukul 08.30 Wita, Minggu (05/11/2023). CIA meninggal dalam kondisi tenggelam.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Polairud, Iptu Khairul Umam menyatakan, sekira pukul 03.00 Wita korban bersama

dengan 26 teman-temannya yang asal Samarinda akan berekreasi ke Beras Basah. Sekira pukul 08.30 Wita mereka melakukan snorkling serta berenang bersama.

"Dari keterangan para saksi, awalnya melihat korban berjalan di pinggir pantai. Lalu saksi snorkling dan menemukan korban sudah dalam keadaan tenggelam," ucapnya.

Setelah itu, saksi membawa korban ke permukaan, serta sempat memberikan pertolongan pertama pada korban.

"BPBD datang dan membawa korban ke Rumah Sakit Amalia Bontang," paparnya.

Sekitar pukul 09.55 Wita, korban CIA (27) dinyatakan meninggal.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Rapat persiapan upacara HKN ke-59 di Ruang Rapat Asisten II. (Yusva Alam)

Persiapan Upacara HKN ke-59, Dinkes Gelar Rapat Lintas Sektor

BONTANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang tengah mengadakan persiapan kegiatan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59. Rencananya upacara ini akan diadakan pada Senin (13/11/2023) mendatang.

Koordinator Seksi Upacara HKN, Nur Ilham menjelaskan, untuk persiapan upacara ini pihaknya mengadakan rapat lintas sektor, Senin (6/11/2023) di Ruang Rapat Asisten II, lantai 3, Bontang Lestari. Dalam rapat ini mengundang OPD terkait, TNI/Polri, dan bidang-bidang kesehatan yang lain.

"Dari hasil rapat itu diputuskan, upacara akan dilaksanakan pada tanggal 13 November. Pasalnya, HKN yang diperingati setiap tanggal 12

November, jatuh di hari Minggu. Sehingga tidak mungkin dilaksanakan," bebernya usai rapat berlangsung.

Dikatakannya, hasil rapat ini sudah final. Pihaknya tinggal eksekusi di lapangan dan membuat undangan. Namun begitu terdapat usulan untuk menyelipkan penyerahan penghargaan atau hasil lomba-lomba di bidang kesehatan.

"Usulan itu kami tampung. Akan kami rapatkan dengan tim di internal dinkes," ujarnya.

Upacara yang akan berlangsung di Halaman DPMPSTP tersebut, akan mengundang TNI/Polri, OPD di luar dinkes, puskesmas dan rumah sakit, serta beberapa perwakilan sekolah SMA. (al/adv)



Kegiatan Lomba Mancing Kelurahan Satimpo. (Dok.Satimpo)

Juara 1 Lomba Mancing Mania Satimpo Sukses Pancing Lele 5,6 Kilogram

BONTANG – Kelurahan Satimpo menggelar Lomba Mancing Mania Ikan Lele dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Bontang. Kegiatan ini dilakukan di Sungai RT 21, Kelurahan Satimpo, Sabtu (04/11/23).

Lurah Satimpo, Maryono mengatakan, pada awalnya pihaknya hanya menyediakan kuota lomba sebanyak 300 peserta, namun karena antusias warga, kuota peserta ditambahkan.

"300 formulir sudah habis dalam waktu dua jam, jadi kami tambah 100 kuota lagi. Itu juga masih ada yang minat ikut," jelasnya.

Tidak ada pungutan biaya untuk registrasi pendaftaran lomba. Selain itu, peserta tidak hanya berasal dari Satimpo, namun seluruh masyarakat Bontang ikut berpartisipasi dalam lomba ini.

Adapun ikan yang disediakan mencapai 350 kilogram, dengan hadiah uang tunai mencapai Rp 21 juta. Pemenang dibagi menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3.

"Ada 24 ekor Ikan bertanda khusus sebagai jackpot, hadiahnya Rp 250 ribu per ekor," ujarnya.

Adapun kategori pemenang yakni yang memperoleh banyak ikan dan memiliki timbangan paling berat. Diketahui, juara pertama berhasil mendapatkan ikan lele seberat 5,6 kilogram.

Ia berharap event seperti ini akan dijadikan kegiatan rutin Kelurahan Satimpo untuk memperingati hari-hari tertentu. Namun, sungai tersebut tetap boleh digunakan gratis oleh masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Apel persiapan HUT ke-21 RSUD Taman Husada. (ist)

RSUD Bontang Gelar Apel Persiapan HUT ke-21

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melaksanakan apel persiapan HUT ke-21 RSUD Bontang, Senin (6/11/2023), bertempat di halaman RSUD Bontang. HUT ke-21 RSUD Taman Husada rencananya akan dilaksanakan pada 12 November 2023.

Kepala Bagian Hukum, Kehumasan dan Kerjasama RSUD Taman Husada Kota Bontang, Syariful Rahman mengatakan, pelaksanaan apel untuk melaksanakan kesiapan staf dan pegawai RSUD dalam pelaksanaan HUT ke-21 RSUD. Ia menyebutkan, pelaksanaan puncak HUT ke-21 RSUD Bontang akan dilaksanakan pekan depan.

“Kami melaksanakan apel pelaksanaan persiapan HUT ke-21 RSUD untuk memastikan kegiatan pelaksanaan,” kata Syariful Rahman,

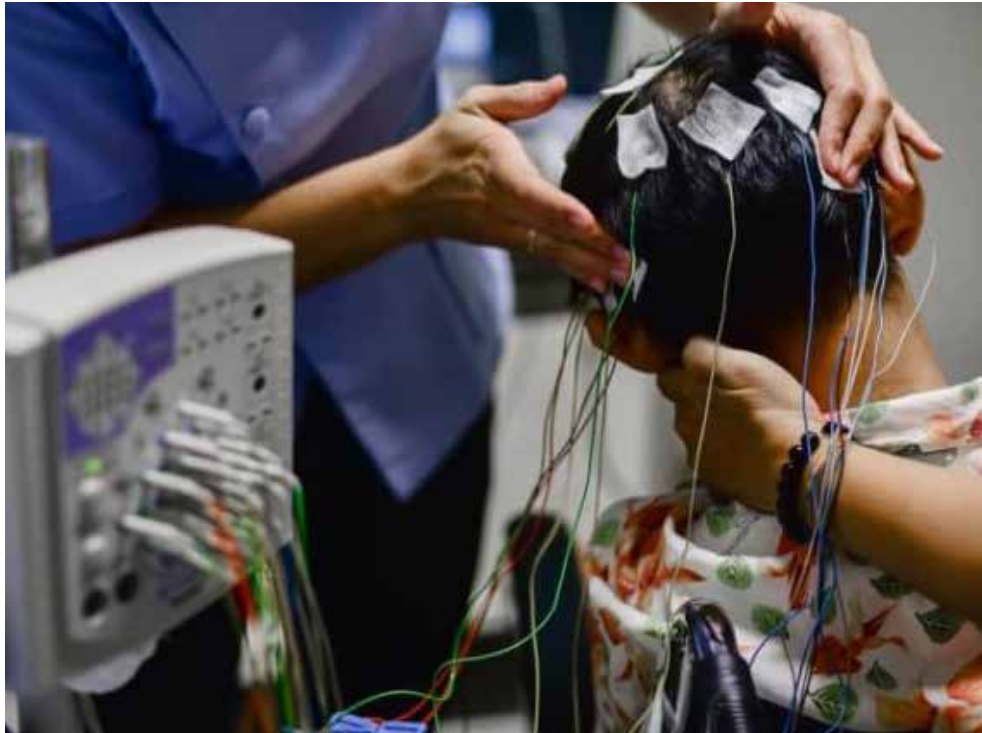
Senin (6/11/2023).

Lanjut Syariful, saat apel tersebut direktur rumah sakit memberikan arahan agar para staf dan pegawai mempersiapkan HUT ke-21 secara maksimal.

“Arahannya tadi direktur untuk mempersiapkan HUT ke-21 dengan baik dan persiapan matang,” katanya.

Ia juga menambahkan, selain memberikan arahan terkait HUT ke-21, Direktur RSUD juga memberikan arahan untuk peningkatan pelayanan di RSUD Taman Husada dengan motto dan tata nilai CERIA.

“Tadi juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan motto dan tata nilai RSUD Bontang yakni Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Aman (CERIA),” ungkapnya. (adv/yah)



Ilustrasi alat EEG. (ist)

Tingkatkan Pelayanan, Klinik Syaraf RSUD Bontang Datangkan Alat Terbaru

BONTANG – Guna meningkatkan pelayanan kepada para pasien, klinik syaraf RSUD Taman Husada mendatangkan alat baru. Alat terbaru tersebut yaitu alat pemeriksaan Electroencefalografi (EEG).

EEG berfungsi untuk melihat gelombang otak dan pemeriksaan kognitif dengan komputerisasi, untuk mengetahui fungsi otak pada gangguan memori.

Selain EEG, rencananya RSUD Bontang di akhir tahun ini juga akan segera melayani pemeriksaan EMG (ElectroMyoGraf) untuk pemeriksaan saraf tepi.

Dokter Spesialis Saraf atau Neurologi, dr Atika Ridwan, Sp.N menjelaskan, bahwa tahun depan RSUD Bontang juga berencana ada alat baru yang akan melengkapi klinik saraf yaitu TMS (Trans Magnetik Stimulasi) untuk melatih fungsi otak yang terganggu dengan gelombang magnet yang biasanya digunakan untuk

pasien stroke, depresi, insomnia, bahkan untuk nyeri.

Ia juga mengharapkan klinik saraf RSUD Bontang tetap bisa melayani masyarakat dari semua pasien mulai dari pasien umum dan BPJS.

"Ya klinik saraf melayani pasien umum, BPJS, maupun asuransi lainnya yang bekerja sama dengan RSUD Taman Husada. 80 persen pasien yang kami layani adalah pasien BPJS," urainya.

"Harapan kami agar klinik saraf dapat berkembang lebih jauh lagi dengan alat yang lebih canggih dan SDM yang lebih terlatih untuk membantu kesembuhan pasien dengan gangguan saraf khususnya di Kota Bontang. Saat ini penanganan ilmu penyakit Neurologi sudah berkembang sangat pesat utamanya dalam pelayanan penyakit stroke," pungkasnya. (adv/yah)



Ruang pemeriksaan salah satu dokter spesialis di RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Terus Lengkapi Dokter Spesialis, Pasien Tak Perlu Berobat Keluar Bontang ke Depannya

BONTANG – RSUD Taman Husada memiliki 32 orang dokter spesialis dan satu dokter sub spesialis. Ini untuk menunjang dalam pelayanan di RSUD Bontang.

Kabid Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr Tri Ratna Paramita menjelaskan, RSUD Taman Husada Kota Bontang saat ini memiliki sebanyak 32 dokter spesialis dan satu dokter sub spesialis dalam pelayanan pasien di rumah sakit.

"Ada tiga orang dokter spesialis yang masih sekolah (pendidikan) sambil sub spesialis lagi," jelas dr Tri Ratna Paramita beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan sesuai dengan Permenkes standar Rumah Sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur yang telah memenuhi standar rumah sakit tipe B.

"Kalau dari standar RS kami sudah terpenuhi tipe

B sesuai dengan kriteria tempat tidur. Jadi untuk kriteria RS kami sudah terpenuhi. Tapi masih ada dokter spesialis yang belum dimiliki. Saat ini dokter masih melaksanakan pendidikan," katanya.

Harapannya ke depannya, ada keterpenuhan berbagai jenis spesialisasi dan sub spesialisasi, agar pasien bisa berobat di RSUD Bontang dan tidak lagi berobat ke luar daerah Bontang.

"Nanti ada pemenuhan berbagai spesialisasi dan sub spesialisasi dalam beberapa tahun ke depan, agar masyarakat tidak jauh-jauh berobat keluar daerah," ungkapnya.

Sebagai RS rujukan, RSUD Bontang juga harus melengkapi dokter spesialis dan sarana pemeriksaan lainnya secara bertahap. (adv/yah)



Penghargaan Anugerah BAPETEN 2023. (ist)

RSUD Bontang Raih Penghargaan BAPETEN 2023

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 2023. Anugerah BAPETEN 2023 diberikan kepada 200 Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan (Yankes) seluruh Indonesia.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP menjelaskan, bahwa penghargaan diberikan pada kategori anugerah yang diberikan nilai A pada fasilitas kesehatan dengan 'Keselamatan dan Keamanan pada Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional'.

Penilaian ini diberikan setelah mengevaluasi instalasi radiologi dan instalasi kateterisasi jantung di RSUD Taman Husada Bontang.

"Pemberian anugerah yang disampaikan secara online, tentunya memberikan kebanggaan bagi kami pihak RS dan masyarakat Bontang pada umumnya. Mengingat pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat tentunya harus mengutamakan keamanan dan keselamatan, apalagi fasilitas terkait dalam kegiatan radiasi dan zat radioaktif," terang

Direktur RSUD dr Suhardi, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, dr Suhardi mengatakan, RSUD Taman Husada Bontang berusaha menjamin dan menjaga mutu layanan kesehatan yang aman dan terbaik untuk masyarakat Bontang dan sekitarnya.

"Penghargaan ini sebagai penyemangat kami dalam melayani masyarakat kota Bontang dan sekitarnya, serta semakin lebih baik dalam memberikan pelayanan yang aman baik untuk pasien maupun pemberi layanan kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan (Nakes)," lanjutnya.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada RSUD Bontang dengan instalasi kateterisasi jantung sebagai salah satu unit yang dinilai dari penghargaan BAPETEN. Di mana saat ini telah melayani pasien pengguna jaminan BPJS Kesehatan.

"Tentunya dengan adanya penghargaan ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap layanan unggulan yang kebetulan hanya ada satu-satunya di kota Bontang ini. RSUD akan terus melayani," pungkasnya. (adv/yah)



Tim POGBA Bontang mendapatkan juara 1 di Liga FJL. (dwi).

Pogba Bontang Juara I FJL, Wakili Kaltim di Tingkat Nasional

BONTANG - Klub Sepak Bola Para Orang Tua Gila Bola (Pogba) Bontang raih juara I di Liga Fossilindo Junior League (FJL) kategori usia 15 tahun, yang berlangsung pada 3-5 November 2023 tingkat Kalimantan Timur (Kaltim), di Stadion Kadri Oneing Sempaja, Samarinda.

Pelatih Pogba, Misbar Borneo mengucapkan syukur dapat meraih keberhasilan berkat kerja sama antar pengurus, pelatih, asisten, serta campur tangan para orang tua siswa. Dimana Bontang berhasil menjuarai di tingkat Kaltim.

"Terima kasih banyak, atas dukungan dari semua pihak serta para anak didik POGBA Bontang dapat meraih juara I. Semangatnya bermain sangatlah luar biasa," ucapnya.

Selama liga berlangsung, Pogba bermain sebanyak 5 kali. Mulai dari babak penyisihan yang dilakukan dua kali, berlanjut dalam satu laga dengan

point seri. Pada tahap Semifinal bertemu dengan Pemuda Tenggara skor 1-0, lanjut ke babak final Tim Pogba Bontang melawan Putra LBK dengan skor 4-3 hasil adu pinalti.

Dik kesempatan yang sama, Rizal Bolang, Manager Pogba Bontang mengatakan, keberhasilan anak didik POGBA harus patut dibanggakan, mengingat umur mereka masih sangat muda. Dengan harapan semua hasil yang sudah diraih, bisa lebih meningkatkan semangat.

"Intinya saya sangat bangga kepada anak-anak semua, yang telah bermain dan bekerja keras dengan sangat kompak, serta tim POGBA juga meraih kiper terbaik," paparnya.

Keberhasilan itu membuat POGBA Bontang mewakili Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan bertanding di tingkat Nasional, Jawa Barat.

Penulis: Dwi S

Editor Yusva Alam

El Nino atau Hobi Impor?

SEBAGAI negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang begitu luasnya, dan dari sisi geografis Indonesia terletak di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Membuat Indonesia mempunyai tanah yang subur sehingga tanaman sangat mudah tumbuh.

Indonesia diberikan Allah kekayaan alam yang melimpah. Tak heran jika Indonesia terkenal dengan sebuah ungkapan "tanah Indonesia tanah surga, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman."

Hanya saja benarkah demikian? Kondisi pangan khususnya beras sebagai makanan pokok orang Indonesia beberapa tahun belakangan semakin mahal dan dari tahun ke tahun harganya semakin melambung tinggi, krisis pangan tak terelakkan, dan benar benar sudah terjadi. Hal ini seakan menghapus sirna fakta bahwa Indonesia adalah negara agraris.

Harga gabah dan beras di Kota Bontang sendiri semakin meroket. Dari data yang dihimpun, harga jual beras di Kota Bontang pekan kedua September 2023 sudah menyentuh angka Rp 16.000 per kilo.

Hal ini pun mendapat respon dari salah satu anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurut beliau mahalnya harga beras saat ini menjadi masalah yang bersifat nasional akibat adanya kondisi Elnino, untuk itu kata beliau pemerintah melakukan tindakan intervensi agar tidak terjadi inflasi. (Infokaltim.id, 27/09/23).

Harga beras juga mahal untuk kota/kabupaten lain seperti PPU, Kutim, dan Samarinda. Faktor kenaikan harga beras adalah adanya Elnino di 7 provinsi.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dalam harian CNBC bertajuk "Harga Beras Terbang 18,44%, Inflasi Beras Tertinggi 5 Tahun" bahwa pada September 2023, terjadi inflasi beras secara bulanan sebesar 5,61% dengan andil 0,18%.

"Inflasi beras secara bulanan di bulan September 2023 merupakan yang tertinggi sejak Februari tahun 2018," ucapnya.

Pada Februari 2018, tercatat inflasi beras mencapai 6,25%. Jakarta. (CNBC Indonesia, 20/02/2023)

Benarkah Hanya karena El nino?

Tidak dimungkiri dampak dari Elnino akan meningkatkan potensi tumbuh awan di Samudra Pasifik Tengah hingga Timur, hingga curah hujan di wilayah sekitarnya berkurang dan Indonesia tak terkecuali, ini kemudian memicu kekeringan, kemarau, dan panas yang berkepanjangan.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansyuri mengatakan bahwa, tidak sekadar El Nino, tapi kurangnya pengawalan, pendampingan, serta penguatan terhadap para petani juga disoroti.

"Akibatnya, petani kita tidak banyak melakukan tanam. Hal ini kemudian berdampak pada pasokan beras dan permintaan di masyarakat," ungkap Abdullah Mansyuri kepada Beritasatu.com, Selasa (29/8/2023)

Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai, kenaikan harga beras tidak sebatas dampak El Nino, tetapi lebih kompleks dan sistemis.

Menurut beliau penyebab pertama, penduduk semakin bertambah tetapi produksi beras makin menurun. Penyebabnya banyak di antaranya luas lahan panen berkurang yang mempengaruhi produksi padi.

Kedua sebutnya, dana triliunan rupiah sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi beras tetap naik.

Ketiga, jelasnya, keberlanjutan pertanian. Hatta menyebut di antara faktor keberlanjutan pertanian adalah masalah sumber daya air.

Indikator berikutnya, ucapnya, adalah ketersediaan modal. Menurut beliau di tengah sistem keuangan yang kapitalistik, orang lebih memilih menimbun uang di perbankan, deposito, dan bermain di pasar modal sehingga uang yang masuk ke dalam sektor riil yang produktif itu sangat kurang ulasnya.

Menurut Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede faktor pendorong harga beras masih mahal, di antaranya karena kenaikan harga pupuk, permasalahan produksi, dan risiko kema-



Oleh:

Asna Abdullah

Aktifis Dakwah

rau panjang atau El Nino. Untuk mengurangi risiko inflasi, pemerintah perlu segera melakukan intervensi subsidi pupuk untuk meminimalkan biaya input pertanian.

Daripapara yang disampaikan berbagai sumber di atas, mengenai penyebab dari naiknya harga beras hingga diperlukan impor beras, nyata dengan jelas bahwa berbagai kebijakan dari pemerintahlah menja-

di sumber permasalahan. Seperti lahan pertanian yang menyempit, pupuk dan bibit yang mahal karena tidak disubsidi, hingga ketersediaan pengairan.

Hanya saja lagi lagi menurut pemerintah, sebab krisis pangan adalah hadirnya El Nino dan dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi beras dalam negeri, untuk itulah pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah impor beras.

Jawara Impor Pangan

Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang yang akrab disapa BW itu meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap, seperti melakukan operasi pasar. Menurutnya, ketika ada kenaikan harga pada sektor bahan pokok, khususnya beras tentu akan berdampak pada inflasi.

Sedangkan presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Pasar Merdeka Samarinda mengatakan, bahwa solusinya adalah dengan melakukan impor beras untuk menstabilkan harga kembali. (Infokaltim.id, 27/09/23)

Di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengatasi dan juga mewaspadaikan kenaikan harga beras agar inflasi tetap terkendali. Distribusi bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), merupakan intruksi Presiden. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga bulan, dimulai pada September hingga November 2023. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulannya. (Tempo.co, 02/09/2023)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menormalisasi harga beras. Impor beras menjadi "jurus andalan" bagi pemerintah untuk jadi solusi saat harga beras melam-

Lanjutan Catatan

bung, keran impor pangan dibuka selebar lebarnya, bahkan Indonesia dinobatkan sebagai peringkat ketiga negara terbesar pengimpor produk pangan.

Saat kebijakan impor beras diterapkan, beras impor pasti akan melimpah di dalam Negeri dan pasti akan mempengaruhi harga gabah dalam negeri, lagi-lagi petani akan menghadapi kondisi yang susah karena mahalnya biaya produksi, dan dipastikan akan merugi.

Sebagaimana diketahui bahwa ketersediaan bahan makanan pokok termasuk beras yang cukup bagi rakyat, tidak bisa lepas dari politik pertanian dan ekonomi yang diterapkan oleh negara, bahwa politik pertanian dan ekonomi di negeri ini berasaskan kapitalisme yang dengan tegas membatasi peran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Bahkan rakyat dibiarkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, negara hanya berposisi sebagai pengatur atau regulator saja.

Hingga yang terjadi adalah ketika ada permasalahan kurangnya ketersediaan beras, pemerintah bukan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya dengan memberdayakan potensi yang dimiliki negeri ini, akan tetapi mengambil jalan pintas dengan mengimpor dari negara lain, yang jelas menguntungkan negara asing hingga para kartel-kartel yang bekerjasama dengan para kapital.

Pemerintah yang kesannya lebih berpihak kepada petani dan rakyat hanya lips service. Impor beras rupanya menjadi hobi ketimbang memajukan pertanian dalam negeri, dan praktis kebijakan ini hanya menguntungkan oligarki yaitu para pengusaha importir yang punya hubungan dekat dengan penguasa sehingga mendapatkan tender impor. Wewenang membuka atau menutup pintu impor memang ada di tangan pemerintah, tetapi pelaku impornya adalah pengusaha importir.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak lepas dari cara pandang pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat yang sangat dipengaruhi oleh sistem sekuler kapitalis, sehingga posisi negara hanya sebagai regulator saja, semua

dibebaskan dan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga tidak ada masalah jika harus mengimpor beras, walau petani di negeri ini menjerit.

Islam dan Ketahanan Pangan

Beras adalah kebutuhan dasar manusia. Sabda Rasulullah saw.

"Siapa di antara kalian yang berada pada waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya." (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Negara sebagai institusi politik yang bertugas melakukan urusan rakyat (riayah syu'unil ummah) wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Islam mewajibkan penguasa (khalifah) untuk memastikan tiap-tiap individu rakyat bisa tercukupi kebutuhan pangannya secara layak. Khilafah tidak hanya wajib memastikan stok pangan aman, tetapi juga memastikan rakyat bisa memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

Terkait swasembada beras, Khilafah tidak hanya menargetkan tercukupinya kebutuhan dalam negeri, tetapi juga ketahanan pangan pada masa depan untuk mengantisipasi paceklik seperti El Nino dan sekaligus terwujudnya stabilitas harga.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, ekstensifikasi pertanian, misalnya dengan menghidupkan tanah mati. Kedua, intensifikasi pertanian, misalnya dengan penggunaan alat pertanian berteknologi canggih hasil karya dalam negeri. Ketiga, penelitian untuk menghasilkan bibit unggul dan alat-alat pertanian modern. Keempat, bantuan pupuk, benih, dan saprotan lainnya. Kelima, memastikan tidak ada gangguan dalam pasar, seperti monopoli, penimbunan, dan penipuan.

Semuanya ini hanya bisa diwujudkan oleh Khilafah karena posisi pemimpin dalam Islam sebagai raa'in (pengurus) dan mas'ul (penanggung jawab) rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan justru membuat rakyat menderita.

Wallahualam.



Salah satu buaya yang berhasil dievakuasi. (ist)

4 Buaya Berukuran 3 Meter Lebih Kembali Dievakuasi, Salahsatunya 'Ompong'

BONTANG - Pasca Buaya Riska dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA) Kalimantan Timur ke Balikpapan Oktober lalu, terdapat total 4 buaya lain yang kembali berhasil dievakuasi BKSDA. Salahsatunya buaya yang disebut 'ompong' oleh masyarakat setempat.

Pada Jumat (3/11/23) lalu, BKSDA bersama masyarakat menangkap buaya ompong berjenis kelamin betina dengan panjang 448 cm dan lebar perut 62 cm.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Lurah Gunung, Denny Febrian. Ia menjelaskan, bahwa buaya-buaya tersebut memang sudah menjadi incaran BKSDA.

"Memang ada 4 buaya yang ditandai ciri-cirinya, dan itu semua memang direncanakan untuk dievakuasi," jelasnya saat dihubungi

Senin (6/11/23)

Dari laporan warga sekitar memang terdapat 4 buaya berukuran lebih dari tiga meter yang sering bolak-balik. Relokasi ini juga bertujuan untuk menyelamatkan satwa, selain itu juga demi keamanan dan keselamatan warga.

"Buaya-buaya besar tersebut direlokasikan di Lembaga Konservasi di Balikpapan sana," tambahnya.

Adapun buaya-buaya kecil yang sering didapat oleh warga, buaya tersebut akan dibawa langsung ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk diletakkan di penangkaran.

"Sejauh ini semua target buaya yang berukuran tiga meter lebih sudah di evakuasi semua, jadi belum ada target lagi," ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



BAWASLU BERAU TEKEN MOU DENGAN MEDIA KALTIM, SEPAKAT JALIN KERJASAMA PUBLIKASI KEPEMILUAN

AD



**SAMBUT HANGAT KUNJUNGAN MEDIA
KALTIM GROUP, MADRI: SEMOGA
SINERGITAS TETAP TERJAGA**



Penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Berau dengan Media Kaltim Promosindo.

BAWASLU BERAU TEKEN MOU DENGAN MEDIA KALTIM, SEPAKAT JALIN KERJASAMA PUBLIKASI KEPEMILUAN

TANJUNG REDEB - Bawaslu Berau dengan PT Media Kaltim Promosindo menjalin kerjasama terkait publikasi kepemiluan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Momen-randum of Understanding (MoU) antar kedua belah pihak.

Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Hotel Grand Parama pada Senin (6/11/2023) yang disaksikan oleh Anggota Bawaslu Berau, Tamjidillah Noor. Sedangkan, saksi dari Media Kaltim Promosindo yakni Direktur Media Kaltimara, Andhika Dezwan dan Jurnalis Radar Media, Amnil Izza.

Ketua Bawaslu Berau, Ira Kencana mengungkapkan, tujuan penandatanganan MoU tersebut untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut juga Ira Kencana turut mengucapkan terima kasih kepada Media Kaltim Group dengan adanya kerjasama yang telah terjalin.

"Melalui MoU ini, artinya kita sama-sama memiliki peran dan kerjasama dalam pencegahan kecurangan pemilu, karena kita akan bekerja dengan banyak pihak," ungkap Ira.

Ia juga menyebutkan pentingnya kerjasama antara Bawaslu dengan media untuk mencerdaskan masyarakat terkait Pemilu.

"Media Kaltim bisa berperan mengedukasi masyarakat, seperti larangan terkait pemilu dan netralitasnya ASN, serta sosialisasi terkait tahapan-tahapan Pemilu," jelasnya.

Ira berharap dalam pesta demokrasi 2024 mendatang, masyarakat tidak lagi dijadikan objek yang dimanfaatkan suaranya, tapi lebih kepada subjek yang independen dalam memilih.

"Saya rasa media dapat menjembatani terkait isu-isu kepemiluan agar tetap konsisten," imbuhnya.

Dirinya menambahkan, perjanjian kerjasama tersebut akan menyiarkan pikiran penyelenggara pemilu melalui media sebagai informasi kepada masyarakat.

"Apalagi Media Kaltim Group punya beberapa anak perusahaan. Kita dimungkinkan untuk membawa pihak lain untuk kerjasama ini dalam penyiaran segala kegiatan Bawaslu," katanya.

Sementara, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto menyambut baik kerjasama tersebut. Dia berkomitmen akan mengerahkan 7 media yang ada di Media Kaltim Group.

"Kita memiliki 7 media, kita akan kerahkan dalam pemberitaan dengan jaringan kita yang tersebar di seluruh Kaltim," tutup Agus, yang juga mantan anggota Bawaslu Bontang ini. (dez)



Kunjungan Media Kaltim Group di kediaman Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

SAMBUT HANGAT KUNJUNGAN MEDIA KALTIM GROUP, MADRI: SEMOGA SINERGITAS TETAP TERJAGA

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyambut hangat kunjungan Manajemen Media Kaltim Group dengan penuh keramahan di kediamannya, Selasa (7/11/2023).

Kunjungan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan Media Kaltim Group untuk menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh penting di setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Tujuannya untuk menjaga sinergitas dan kerjasama yang selama ini telah dibangun.

Termasuk dengan DPRD Berau sebagai salah satu pihak yang memajukan pemerintah daerah. Tentunya memerlukan publikasi informasi seputar kegiatan legislatif.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengapresiasi, adanya Media Kaltim Group yang telah mengembangkan sayapnya hingga ke Kabupaten Berau. Pun selalu memberikan informasi yang akurat terkait kegiatan legislatif kepada masyarakat.

Madri berharap, sinergitas dan kerjasama antara DPRD Berau dengan Media

Kaltim Group terus terjalin. Sehingga, secara berkelanjutan dapat menjalankan fungsi media sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat, dan tidak terbatas ruang serta waktu.

“Semoga sinergi baik ini dapat terus memberikan manfaat positif bagi semua pihak. Dan semoga Media Kaltim Group terus sukses menginformasikan perihal perkembangan Berau untuk masyarakat,” harapnya.

Sebagai bentuk penghargaan, Media Kaltim Group memberikan poster eksklusif bergambar Ketua DPRD Berau dan bertuliskan “Tegas Merakyat”. Itu dipilih sesuai dengan kepribadian Ketua DPRD Berau yang dikenal tegas namun merakyat.

CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan Ketua DPRD Berau di kediamannya. Besar harapan sinergitas ini akan terus menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pewartu: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

ADMINISTRASI TKA WAJIB DIPERHATIKAN

TANJUNG REDEB – Pemerintah diminta jajaran legislatif untuk melakukan pengawasan dan menginventarisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Kabupaten Berau.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menuturkan, inventarisasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui para TKA memenuhi persyaratan atau tidak.

“Apalagi sudah ada aturan dan undang-undang untuk tidak dilanggar. Jika ada TKA tidak taat administrasi, harus ditindak tegas. Jika perlu dideportasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, TKA yang masuk ke Bumi Batiwakkal harus mengantongi legalitas yang jelas. Jangan sampai, kata Syarifatul, ada izin berwisata tetapi digunakan untuk bekerja.

“Peraturan ini berlaku sama di luar negeri, jadi kita juga harus tegas,” ujarnya.

Politikus Golkar ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya humanis, jika menemukan TKA yang melakukan pelanggaran.

“Jika fatal, bisa saja langsung dideportasi. Jangan anggap sepele permasalahan administrasi,” pungkasnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

SOROT MARAKNYA PERNIKAHAN DINI

TANJUNG REDEB – Maraknya kasus pernikahan dini di Bumi Batiwakkal disoroti Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Untuk itu, ia meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau beserta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) untuk menampilkan data pernikahan dini.

Dia menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus menampilkan data pernikahan dini. Tujuannya sebagai tindak lanjut adanya Jambore Kades Posyandu untuk pelayanan kesehatan.

“Coba di cek, berapa data pernikahan dini, artinya stunting dan pertumbuhan penduduk dari Keluarga Berencana (KB) tidak terukur dari normalnya usia pernikahan,” katanya.

Dirinya membeberkan, terdapat banyak kasus pernikahan usia muda yang

dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Berau hingga saat ini.

“Terbuktinya, banyak yang minta surat dispensasi menikah ke pengadilan,” bebrnya.

Politikus PDI-P itu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui OPD terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di sekolah guna memberikan pemahaman terkait pernikahan dini.

“Perbanyak sosialisasi, utamanya di sekolah. Itu upaya menekan angka pernikahan dini,” terangnya.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya menekan pernikahan usia muda juga berdampak pada pencegahan stunting agar dapat menciptakan generasi emas di 2045 mendatang.

“Masalah stunting sudah menjadi topik utama di Berau, jadi perlu penangan yang tepat,” pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

PENYUSUNAN APBD HARUS SESUAI DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN

TANJUNG REDEB – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo harus dilakukan secara real atau nyata.

Dia menerangkan, penyusunan APBD secara real akan menyesuaikan kondisi perekonomian global yang belum stabil. Hal itu juga dinilainya mencerminkan upaya percepatan peningkatan ekonomi daerah.

“Pembangunan ekonomi di daerah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya APBD merupakan jaminan dari pemer-

intah daerah untuk mewujudkan sinergitas, upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah.

“APBD juga sebagai alat untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program kegiatan dan sub kegiatan,” katanya.

Politikus Demokrat ini juga menyebut pada saat tertentu, manfaat APBD akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga penyusunan APBD harus dilakukan secara nyata.

“Penyusunan APBD harus dilakukan secara real dan nyata agar apa yang menjadi tujuan dari APBD bisa tercapai dengan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata,” tutupnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

PEMERINTAH HARUS BERPERAN TINGKATKAN EKSISTENSI UMKM

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus guna meningkatkan eksistensi pelaku UMKM.

Dia mengungkapkan, pemberian stimulus untuk UMKM sangat penting agar dapat terus berkembang. Selain itu juga agar memiliki daya saing dengan pelaku usaha modern.

“Dengan hal itu tentunya juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, serta bermanfaat bagi daerah dari segi ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menerangkan, stimulus yang diberikan untuk UMKM berupa permodalan, sarana dan prasarana, serta

pelatihan.

“Pelatihan pengembangan produk sangat berpengaruh terhadap penjualan mereka, ini salah satu yang perlu dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Dirinya mengaku sangat mendukung UMKM, terlebih dengan hal yang berkaitan dengan kemajuan UMKM.

“Jadi stimulus ini juga merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” terangnya.

Kendati demikian, politikus NasDem ini mendorong pemerintah melahirkan solusi nyata untuk kemajuan UMKM. Terlebih pelakunya dari masyarakat.

“Permintaan hal seperti itu sering kami temui saat penjangkaran aspirasi,” tandasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

AGAR PARIWISATA TAK JALAN DI TEMPAT, HARAP OPD TERKAIT BERBENAH

TANJUNG REDEB – Menjelang libur akhir tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau didorong untuk berbenah. Sebab, banyak wisatawan yang akan berkunjung.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah menuturkan, pembenahan yang dilakukan adalah memperbaiki fasilitas penunjang, agar wisatawan yang datang dapat nyaman.

“Supaya para wisatawan yang datang juga tidak jera untuk kembali. Apalagi sektor pariwisata ini bermanfaat untuk PAD,” katanya.

Menurutnya, jika pembenahan tidak dilakukan sejak dini, besar kemungkinan pariwisata yang dimiliki Berau dapat ketinggalan dengan daerah lain.

“Apa yang dimiliki Berau, tidak dimiliki daerah lain di Kaltim. Ini kesempatan bagus. Namun jika

OPD tidak berbenah, maka sia-sia saja,” tegasnya.

Dirinya menyebut, setiap tahunnya, ada ribuan wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara. Namun jika tidak ada pembaharuan, dirinya menyakini, Berau akan dilupakan.

“Jika ingin seperti Bali, Jogjakarta, harus berani berubah. Jangan jalan ditempat saja,” imbuhnya.

Dirinya juga mendorong pemerintah untuk menggandeng pihak swasta, demi kemajuan pariwisata Berau. Jika hanya menggandakan OPD terkait, Andi Amir yakin pariwisata Berau hanya jalan ditempat.

“Sebagai contoh. Saya ke Derawan, dan dari tahun ke tahun begitu saja. Apakah saya merasa ada yang spesial lagi. Tentu tidak. Makanya saya tekankan untuk ada perubahan,” pungkasnya. (adv/dez)



SENGGOL TRUK, PENUMPANG SEPEDA MOTOR TEWAS DI TEMPAT



**TIM KECAMATAN BALIKPAPAN
KOTA TIDAK TEMUKAN
PELANGGARAN BALIHO ALGAKA**



Polisi Lalulintas menunjukkan kendaraan sepeda motor korban usai di senggol truk.

SENGGOL TRUK, PENUMPANG SEPEDA MOTOR TEWAS DI TEMPAT

BALIKPAPAN - Kecelakaan lalulintas kembali terjadi di jalan poros Balikpapan-Samarinda atau tepatnya di Jalan Soekarno Hatta kilometer 21 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara pada Minggu (5/11/2023) sekitar pukul 23.00 Wita. Kecelakaan ini melibatkan sebuah sepeda motor dan truk.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyani mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat sepeda motor dengan nomor polisi KT 2351 ZG yang dikemudikan NP (21) melintas dari arah Samarinda menuju Balikpapan melewati Jalan Soekarno-Hatta.

NP saat itu tak sendirian, ia pergi berboncengan dengan rekannya RS (19). Kemudian dari arah berlawanan datang satu unit truk. Saat di jalan menikung

di kilometer 21, sepeda motor yang dikemudikan NP kemudian menyenggol truk.

"Pada saat melintas di badan jalan menikung ke kiri mendatar, datang dari arah berlawanan Kendaraan bermotor jenis truk," ujarnya Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, bagian belakang motor NP yang menyenggol truk tersebut kemudian membuat rekannya yang berada dibelakang pun terjatuh ke badan jalan. RS pun saat itu tewas di lokasi kecelakaan dengan mengalami luka pada bagian kepalanya. Sementara NP yang terjatuh ke kiri jalan mengalami luka berat pada tangannya.

"Penumpang kendaraan R2 mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia. Sementara pengemudi sepeda motor luka pada tangannya," jelasnya.

Ropiyani mengaku saat itu langsung menuju lokasi kecelakaan. Di TKP kepolisian hanya mendapati sepeda motor milik korban yang hancur pada bagian roda belakang dan body depan sepeda motor. Sementara truk yang menabrak pesepeda motor tersebut tak ditemukan berada di lokasi kejadian. Diduga, sopir truk melarikan diri saat kecelakaan berlangsung.

Media ini juga mendapat informasi bahwa korban penumpang sepeda motor sempat terseret beberapa kilo meter dari lokasi kecelakaan. Namun, kepolisian belum bisa membenarkan terkait informasi yang beredar tersebut.

"Saat ini kepolisian khususnya Satlantas masih melakukan lidak," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Jalan Projakal, Kelurahan Graha Indah yang rusak akibat dampak proyek PGN.

IMBAS PROYEK PGN, JALAN PROJAKAL RUSAK DAN BAHAYAKAN PENGENDARA

BALIKPAPAN - Warga Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara tepatnya Jalan Projakal mengeluhkan dampak bekas galian proyek pipanisasi jaringan gas Senipah-Balikpapan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Solution. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang.

Oddang mengatakan, sejumlah warga Graha Indah yang setiap hari melintasi Jalan

Projakal mempertanyakan kapan jalan tersebut diperbaiki. "Proyek di wilayah ini sudah selesai, kenapa terkesan pembiaran? tidak dibaiki lagi jalannya seperti semula," ujarnya Senin (6/11/2023).

Oddang menambahkan, sering sekali warga menyampaikan keluhan dan meminta solusi sesuai komitmen awal pengerjaan, tetapi hingga saat ini terkesan ada pembiaran dan tidak ada solusi nyata dari perusahaan tersebut.

"Solusinya kok terjadi pembiaran, tidak sesuai dengan komitmen awal mengerjakan penggalian pipa kemarin itu," jelasnya.

Oddang menyebut sudah banyak pengendara motor jatuh di wilayah ini. Apalagi jika malam hari bekas galian proyek ini sangat berbahaya karena kurangnya lampu penerangan. Mengingat jalan ini jalan poros menuju penyebaran Kariangau yang jumlah pengendara melintas lumayan cukup padat.

"Ini keluhan masyarakat yang sudah lama, belum ada tindak lanjutnya, pihak Lurah maupun Camat juga tidak ada solusinya, terkesan pembiaran," tambahnya.

Komunikasi bersama pihak perusahaan melalui jaringan seluler untuk bisa dikerjakan secepatnya sudah sering kali dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil juga.

"Sering sudah meminta tolong untuk menimbun dengan latrid, tapi hingga akhir tahun ini belum juga ada wujud nyatanya," tegas Oddang.

Oddang berharap supaya pihak perusahaan dapat menyampaikan kepada pihak kontraktor, untuk segera memperbaikinya. Memang pihak kontraktor sudah menimbun tanah, tapi hanya sekedarnya saja.

"Sejak itu ditimbun kembali, kan di bawah berlumpur kemudian di atas seperti itu. Jika kemarau oke tidak bergeser, tapi setelah ada hujan jadi bergeser lagi. Itu kan ada anggarannya," ujar Oddang lagi.

"Pernah sangking jengkelnya warga di wilayah ini, pernah ditanami pohon pisang. Tepat di depan pencucian mobil di Jalan Projakal," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Humas PGN Solution, Daniel Soerbakti saat dihubungi melalui pesan seluler, mengatakan masih menunggu perbaikan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta kilometer satu, setelah selesai baru bergeser ke Jalan Projakal.

"Iya, kita perbaiki dulu yang di kilo 1, baru yang di sana," ujarnya singkat. (ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Tim Kecamatan Balikpapan Kota saat monitoring baliho dan algaka yang melanggar aturan.

TIM KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TIDAK TEMUKAN PELANGGARAN BALIHO ALGAKA

BALIKPAPAN - Tim Kecamatan Balikpapan Kota menggelar razia trantibum terkait tentang estetika kota, Senin (6/11/2023). Dalam razia ini, pihak Kecamatan Balikpapan Kota bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan fokus pada penertiban papan iklan yang dinilai mengganggu estetika Kota Balikpapan. Baik itu hanya papan iklan seperti tulisan terima pijet dan sebagainya bahkan hingga Alat Peraga Kampanye (Algaka).

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Balikpapan Kota, Iskandar Noor mengatakan, penertiban dilakukan karena Kecamatan Balikpapan Kota menjadi jantung Kota Balikpapan. Mulai dari kantor Balai Kota hingga DPRD serta banyaknya hotel berbintang yang sering dijadikan tempat menginap tamu dari luar kota.

Setiap ada kunjungan dari mana pun juga tentu melintasi jalan protokol, di kawasan Jalan Jendral Sudirman yang juga masuk di kawasan Kecamatan Balikpapan Kota. Oleh sebab itu, maka keindahan jantung kota tersebut harus di jaga, lebih lagi menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadikan kota ini makin sering di kunjungi.

"Kami dari pemerintah tentu merasa malu kalo ada tamu melihat sepanjang jalan ada tulisan pijet lah dan sebagainya yang ada di tiang listrik atau di pohon," ujarnya usai kegiatan.

Lebih lanjut Iskandar Noor menjelaskan, pihak dari kecamatan tak sendirian. Meluncur

dari Kantor Kecamatan Balikpapan Kota, tim ini bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyusuri sepanjang jalan protokol di wilayah Balikpapan Kota.

"Kami menyisir dari Kecamatan Balikpapan Kota kemudian menuju ke arah Pelabuhan Semayang, lanjut arah Lapangan Merdeka hingga daerah Damai," jelasnya.

Dua jam lebih menyisir di kawasan tersebut, tidak ada satupun pelanggaran yang ditemukan alias nihil.

"Alhamdulillah, untuk di Kota bisa dilihat sendiri tadi nihil. Tidak ditemukan pelanggaran yang seperti itu," tambahnya.

Iskandar Noor menegaskan, yang dia tuntaskan seluruh papan iklan baik itu Algaka maupun papan iklan lainnya.

"Ini hanya yang ada di pohon, tiang listrik, kalo yang besar-besar itu nanti dari Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)," ujarnya lagi.

Hasil nihil yang didapat itu juga tak luput dari kerja keras tim Trantibum Kecamatan Balikpapan Kota yang terus melakukan imbauan dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat ataupun partai politik.

"Artinya di sini tidak menemukan pelanggaran itu bukan kami gagal. Tapi justru berhasil. Karena langkah pencegahan seperti pemberitahuan yang kami lakukan itu sampai ke masyarakat," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



ANTISIPASI KELANGKAAN, PASER SIAPKAN PUPUK ORGANIK UNTUK PETANI

**DPRD PASER DUKUNG RENCANA
PENGENDALIAN INFLASI PEMKAB
PASCA TERIMA INSENTIF FISKAL**



ANTISIPASI KELANGKAAN, PASER SIAPKAN PUPUK ORGANIK UNTUK PETANI

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser secara perlahan mengalihkan kebiasaan petani dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk hayati atau organik. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran.

"Ini sebagai antisipasi, siapa tahu ke depan terjadi kelangkaan, dan kenaikan harga yang luar biasa pada pupuk kimia. Makanya kami bekerjasama dengan CV Gema Tani Etam," kata Bupati Paser, Fahmi Fadli.

Fahmi menilai produsen pupuk seperti PT Pupuk Kaltim yang kini menjadi pemasok utama kebutuhan nutrisi tanaman pertanian hortikultura dan perkebunan di Bumi Daya Taka, memiliki banyak pelanggan. Diperlukan alternatif pasokan pupuk dengan harga murah.

"Realisasi program pertanian sebagai sektor andalan dalam visi misi saya adalah memastikan kebutuhan pupuk. Jika tak diambil kebijakan secara cepat maka petani akan mengalami kegagalan," tandasnya.

Kebudayaan pabrik pupuk hayati yang tak jauh dari Kabupaten Paser, menurutnya, menjadi nilai lebih sendiri bagi Pemkab Paser. Apabila program kerjasama penyediaan pupuk bagi petani berhasil, barulah dilakukan kerjasama lanjutan. Bila hasilnya memuaskan, produksi pertanian meningkat, Fahmi berpendapat akan mencoba mengadopsi teknologi milik CV Gema Tani Etam.

"Kalau hasilnya nanti ada peningkatan, walaupun ada testimoni dari para petani dan nelayan. Tapi kita harus melihat hasilnya di Paser. Barangkali apakah lebih baik, kalau kurang baik apakah formulasi diubah, sebab kondisi tanah berbeda. Karena kita sebagai pengguna, tidak menutup kemungkinan kita minta buka pabrik di Paser. Petani bisa mudah mendapatkan pupuk dan bisa menyerap tenaga kerja," urai Fahmi Fadli.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTH) Erwan Wahyudi menerangkan kerjasama dengan CV Gema Tani Etam. Pemkab Paser bakal menggelontorkan



Pemkab Paser menyiapkan ketersediaan pupuk organik

dana APBD senilai Rp7 miliar di tahun 2024.

Menurutnya, Pemkab Paser telah memiliki program percepatan pengembangan pertanian untuk memasok kebutuhan pangan dalam daerah, serta Ibu Kota Nusantara. Seperti Paser berbuah dan peningkatan hasil produksi pada lahan pertanian sawah dengan area 9.000 hektar.

"Kita ini sangat memerlukan pupuk. Ada program Paser berbuah dan pertanian padi rawa. Makanya kita pakai produk dari CV Gema Tani Etam, yakni Semok. Produk ini sudah teruji oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kaltim," bebernya.

Perusahaan ini tidak hanya menjual produk, tapi juga melakukan pendampingan ke petani. Menurutnya pendampingan terhadap petani, juga sebagai solusi minimnya jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Paser.

"Kita butuh pengalaman CV Gema Tani Etam, yang salam ini melakukan pendampingan ke petani yang berhasil di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga kita bisa adopsi dan berhasil," katanya.

Erwan memastikan di tahun 2024, komitmen terhadap pertanian bisa tergambarkan dari nilai anggaran yang dikucurkan mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dan berbagai program lain.

"Kami sudah sediakan Rp15 miliar masuk dalam sarana, belum lagi untuk penyuluhan, dana perubahan, hasil Musrenbang dan berbagai sumber pembiayaan lain," tandasnya.

Direktur CV Gema Tani Etam S Wahyudi menjelaskan penggunaan produk buatannya dapat mengu-

rangi 30 hingga 35 persen beban modal, ditambah peningkatan hasil produksi mulai 20 sampai 50 persen.

Hal itu bisa dilihat dari empat kali penanaman yang dikerjakan di lingkungan Balai Benih Padi Provinsi Kaltim. Sebelumnya produksi padi hanya tiga hingga empat ton per hektar, kini menjadi tujuh ton.

Pun demikian, pihaknya juga telah bersaing dengan 23 perusahaan swasta dan BUMN yang menjalankan program food estate Pemerintah Pusat di Tamban Catur, Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahwa hasil produksi pertanian padi dari dua ton per hektar menjadi enam hingga ton.

"Waktu itu dalam kurun waktu satu tahun padi mereka selalu kerdil. Alhamdulillah kita masuk dan hasilnya meningkat," tandanya.

Direktur Perumda Prima Jaya Taka M Fitriansyah Mubarak menambahkan banyak pilihan pupuk bagi petani di sektor pertanian hortikultura dan perkebunan. Ada kimia dan hortikultura. Ia menilai sekalipun lokasi lahan bagus, apabila kurang subur maka hasilnya tidak maksimal.

"Kami sangat mengapresiasi CV Gema Tani Etam, semoga produknya tidak hanya di Balikpapan, tapi juga harus ada di Kabupaten Paser," ucapnya.

Sebab, pupuk hayati menjadi alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah. Produsen pupuk kimia pun sudah mendorong pupuk organik. "Mudahan kita bisa kerjasama, dan memproduksi di Paser. Kita punya bahan baku sangat banyak, kita punya batu gunung dan batu kapur pertanian," tutupnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



AHMAD RAFI'I BERPOTENSI BEBAS JIKA PEMBUKTIAN SURAT PALSU TIDAK TERPENUHI

PASER - Persidangan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang menyeret oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Ahmad Rafi'i sebagai terdakwa, hingga kini terus berjalan.

Terkini, melalui Penasehat Hukum Ahmad Rafi'i, Hendrik Kusnianto menyatakan, pihaknya sudah menghadirkan ahli yang meringankan kliennya, yakni Ahli Pidana, Prof. Mudzakkir, SH.MH, di Pengadilan Negeri Balikpapan, Rabu (1/11/2023) lalu.

"Inti dari keterangan ahli yang kami hadirkan menyebut, bahwa terhadap dugaan penggunaan surat palsu, maka suratnya itu harus dinyatakan palsu terlebih dahulu," kata Hendrik via telepon saat dihubungi, Senin (6/11/2023).

Sehingga, berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan ahli pidana yang dihadirkan, lanjut Hendrik, pasal yang diterapkan terhadap Ahmad Rafi'i, tidak tepat karena unsur pidananya yakni Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak terpenuhi.

"Mekanisme pembuktian perihal surat palsu tidak terpenuhi karena hanya berdasarkan ahli bahasa yang mana kita juga telah menghadirkan ahli bahasa yang menerangkan jika surat tersebut sudah sesuai," terangnya.

Sebelumnya, pihak pengacara juga menghadirkan Joni Endardi, sebagai Ahli Bahasa, yang merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Peneliti di Balai Bahasa DIY (BBY), Selasa (24/10/2023) lalu.

"Dari keterangannya, seorang ahli bahasa tidak boleh dan tidak ada kewenangan menyatakan palsu atau tidaknya suatu surat," kata Hendrik.

Hendrik menyebut, dari fakta persidangan yang sejauh ini sudah berjalan, seharusnya Ahmad Rafi'i diputus bebas dari jeratan hukum. Kendati begitu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keyakinan Majelis Hakim.

"Kalau masalah putusan kami tim penasihat hukum tidak bisa memastikan. Tetapi jika melihat fakta persidangan sejauh ini seharusnya putusan bebas. Tapi selebihnya kami kembalikan kepada keyakinan dan keberanian Majelis Hakim," ucapnya.

Dalam kasus ini, Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu terjerat perkara penggunaan surat palsu atas lahan atau tanah di kawasan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan luasan 4,2 hektare milik PT Kutai Refinery Nusantara (KRN).

PT. KRN sendiri merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor pengolahan minyak kelapa sawit. Potensi kerugian PT KRN melalui legalnya sebagai pelapor diperkirakan mencapai Rp 11 miliar.

Selanjutnya, proses persidangan akan dilakukan berupa pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan lalu pemeriksaan terdakwa, lalu tuntutan, pembelaan dan diakhiri putusan.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Bupati Paser, Fahmi Fadli terima simbolis insentif fiskal dari Mendagri RI, Tito Karnavian

DPRD PASER DUKUNG RENCANA PENGENDALIAN INFLASI PEMKAB PASCA TERIMA INSENTIF FISKAL

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser atas capaian dalam pengendalian inflasi daerah hingga memperoleh insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, setelah Kabupaten Paser masuk dalam 34 daerah penerima insentif fiskal pengendalian inflasi yang terdiri dari 3 Provinsi, 6 Kota, dan 25 Kabupaten.

"Tentunya kami mengapresiasi capaian itu. Artinya Pemkab Paser serius dalam mengendalikan inflasi daerah. Sehingga kita harus dukung apa yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikannya kedepan," kata Hendra Wahyudi.

Insentif fiskal sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu dalam upaya perbaikan atau pencapaian kinerja.

Salah satu perbaikan atau pencapaian kinerja itu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional di daerah.

Adapun penerimaan insentif fiskal itu sebesar Rp 10,9 miliar yang diberikan oleh Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang diserahkan secara simbolis, di Jakarta, Senin (6/11/2023).

"Pastinya kami juga siap mendukung pemerintah dalam pengelolaannya. Sebisa mungkin ini langsung berdampak ke masyarakat agar perekonomian di Kabupaten Paser tetap stabil," ucapnya.

Diketahui, sebelumnya Bupati Paser, Fahmi Fadli, akan mengalokasikan insentif fiskal itu untuk lebih meningkatkan kinerja Pemkab Paser untuk mengendalikan inflasi seperti sidak pasar, bazar UMKM, bazar pasar murah, bantuan bibit dan program lainnya.

Fahmi turut merencanakan agar pengendalian inflasi masuk dalam program jangka panjang daerah yang bakal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap di 2024 mendatang Kabupaten Paser bisa memproduksi bahan-bahan pokok secara mandiri.

"Upaya ini termasuk juga untuk program jangka panjang agar Paser bisa meningkatkan produksi pangan sendiri melalui program kemandirian pangan sehingga tidak bergantung dari pasokan luar," ucap Fahmi. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



RDP di Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

LANJUTAN PERBAIKAN WISKUL, KEMUNGKINAN DI 2024

PASER - Kerusakan lantai atas booth kontainer kawasan wisata kuliner (Wiskul) Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (6/11/2023).

DPRD Kabupaten Paser memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Paser termasuk konsultan perencana pembangunan hingga perwakilan pedagang Wiskul.

Sebab belum ada penanganan terhadap fasilitas Pemkab Paser itu, tak semata abai terhadap keluhan pedagang, melainkan ada persoalan keuangan dibalik pembangunannya yang baru diresmikan Maret 2023 lalu.

"Perbaikan Wiskul dalam waktu dekat tidak berani dilaksanakan, mengingat pembangunannya baru saja diresmikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Kadiaporapar) Kabupaten Paser, Arief Rahman.

Di sisi lain, adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan Pemkab Paser terhadap pihak kontraktor lantaran penyelesaian pengerjaan yang tidak tepat waktu atau molor dari target kerja yang sudah disepakati sebelumnya.

Diketahui, kekurangan pembayaran itu senilai Rp 634 juta. Sehingga dengan begitu, ia tengah menyelesaikan keuangan itu dengan meminta Inspektorat Kabupaten Paser

untuk dilakukan audit terlebih dahulu.

"Saya sudah panggil pihak konsultan juga Bappedalitbang. Setelah dipelajari, seharusnya ditunda dulu untuk pekerjaan kontainer. Kalau diperbaiki berarti kita numpang di kegiatan lama, jadi kegiatan yang baru tidak ada tanggung jawab sama sekali," kata Arief Rahman.

Disporapar Kabupaten Paser memastikan, kerusakan booth kontainer Wiskul Sungai Tuak bakal ditangani pada 2024 mendatang dengan perencanaan yang matang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Paser.

"Jadi nanti kami serahkan langsung ke DPUPR Kabupaten Paser untuk pelaksanaan pekerjaannya sebagai dinas teknis," terangnya.

Lebih jauh ke belakang, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Budi Santoso menilai, pemindahan Wiskul dari yang sebelumnya ke lokasi terkini, terkesan dipaksakan. Pasalnya, jika mengacu pada perencanaan, fokus pembangunan lebih dulu untuk pusat olahraga.

"Jika melihat perencanaan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Tuak hanya memfokuskan untuk pembangunan area sport center dengan total anggaran Rp4,9 Miliar dari Bantuan Keuangan (Benkeu) Provinsi," kata Budi. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari